

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Gambaran Umum Penelitian

Lembaga pendidikan merupakan salah satu hal yang paling diperhatikan oleh para orang tua. Hal ini menjadikan pencarian akan informasi tentang lembaga pendidikan pada orang tua diatas 35 tahun terjadi cukup sering. Orang dewasa atau orang tua berusia diatas 35 tahun oleh Marc Prensky digolongkan menjadi golongan *Digital Immigrants*. Penggolongan ini terjadi karena orang tua berusia diatas 35 tahun semasa hidupnya mengalami migrasi dari aktivitas komunikasi tanpa teknologi digital pada aktivitas komunikasi dengan teknologi digital, berbeda dengan generasi millennial dan Gen-Z yang sejak lahir sudah mengenal dunia teknologi digital sehingga kaum ini tergolong pada golongan Digital Native. Penelitian ini akan difokuskan pada pencarian dan pengelolaan informasi tentang kekerasan di lembaga pendidikan oleh digital imigran.

2.2 Kebutuhan Informasi

Pencarian informasi pada dasarnya adalah proses yang terjadi dalam adanya perubahan dari “tidak tahu” menjadi “tahu” akan suatu informasi. Terjadi pencarian informasi ini tentu saja melalui proses adanya motif dilakukannya pencarian informasi tersebut. Keinginan seseorang untuk mengetahui sesuatu informasi tentu saja didapat dari adanya suatu dorongan. Dorongan tersebut dapat terjadi dari berbagai macam jenis dorongan atau motif. Salah satu motif dari adanya pencarian informasi adalah adanya kebutuhan akan informasi.

Kebutuhan informasi biasanya didorong oleh situasi problematik yang terjadi dalam diri manusia, pada lingkungan internalnya, yang dirasakan tidak memadai untuk mencapai suatu tujuan tertentu dalam hidupnya. Tidak memadainya hal ini menyebabkan seseorang merasa harus memperoleh masukan (input) dari sumber-sumber di luar dirinya. Jadi kebutuhan informasi di sini merupakan suatu kebutuhan untuk mengisi kekosongan tertentu dalam diri manusia, yaitu dalam kondisi pengetahuannya yang merasa kekurangan (Pendit, 1992 -2015: 76).

Kebutuhan informasi juga timbul ketika seseorang menyadari adanya jurang atau jarak antara pengetahuan yang sudah dimiliki oleh dirinya dengan permasalahan yang dihadapinya (Nicholas, 2000: 20). Dengan kata lain, seseorang bisa dikatakan membutuhkan informasi ketika ia menyadari bahwa pengetahuan yang dimiliki dirinya masih kurang mencukupi untuk memecahkan permasalahan yang ada di dalam hidupnya.

Menurut Wilson yang dikutip oleh Ginting (2011: 18) menyatakan bahwa munculnya kebutuhan informasi dipengaruhi oleh kebutuhan pribadi yang berkaitan dengan kebutuhan fisiologi, afektif, maupun kognitif. Kebutuhan ini terkait dengan peran seseorang di dalam keluarga, peran seseorang dalam pekerjaan atau kegiatan, dan tingkat kompetensi seseorang sebagaimana yang diharapkan oleh lingkungannya.

Menurut Krikelas (dalam Reijo Savolainen 2019) konsep tentang kebutuhan informasi dapat dipahami secara umum sebagai suatu kesenjangan antara struktur

pengetahuan yang dimiliki dengan yang seharusnya dimiliki. Suatu ketidakpastian yang muncul dalam diri seseorang dan diyakini dapat dipenuhi dengan adanya informasi (*It when an uncertainty arise in the individual which the individual believes can be satisfied by information*)(Sarika, 2015: 38). Konsep ini juga dapat dibedakan antara an information needs dan an Information wants. An Information Wants adalah keinginan terhadap informasi untuk menghilangkan keragu-raguan, sementara an Information needs adalah suatu kondisi, baik diterima/diakui atau tidak oleh seseorang terhadap informasi yang diperlukan untuk memecahkan masalah (Sarika, 2015: 38).

Lasa HS pada bukunya menerangkan bahwa kebutuhan informasi merupakan adanya perasaan membutuhkan yang didasarkan pada keinginan untuk memahami, menguasai lingkungan, menemukan keingintahuan (*curiosity*) dan penjelasan (*exploratory*), hal ini diawali dengan adanya pertanyaan dimana pertanyaan ini akan dicari jawabannya. Perasaan membutuhkan yang dimiliki seseorang pasti terdiri pulaa dari adanya kebutuhan informasi. Kebutuhan informasi ini juga linear dengan fase hidup seseorang, semakin tinggi level hidup seseorang maka kebutuhan informasi juga akan semakin tinggi. (Lasa HS, 2017)

2.3 Pencarian Informasi

Ketika manusia merasa memiliki kebutuhan akan informasi apapun motif dorongan nya, maka manusia tersebut akan melakukan pencarian informasi sesuai dengan kebutuhan nya. Pencarian informasi ini berguna untuk mengembangkan manusia menjadi “tidak tahu” menjadi “tahu”. Bila pembahasannya dikerucutkan ke perilaku pencarian informasi, maka yang dimaksud dengan perilaku pencarian informasi adalah kegiatan seseorang yang dilakukan untuk mendapatkan informasi. Manusia akan menunjukkan perilaku pencarian informasi untuk memenuhi kebutuhannya. Perilaku pencarian informasi dimulai ketika seseorang merasa bahwa pengetahuan yang dimilikinya saat itu kurang dari pengetahuan yang dibutuhkannya. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut seseorang mencari informasi dengan menggunakan berbagai sumber informasi. Tindakan menggunakan literatur adalah suatu perilaku yang kenyataannya menggambarkan berbagai tujuan. (Krikelas dalam Reijo, 2019: 21-22).

Berkaitan dengan adanya kebutuhan akan informasi, maka manusia akan melakukan proses pencarian informasi. Proses pencarian informasi ini melibatkan berbagai macam aspek. Diantara yaitu media yang digunakan dalam mencari informasi. Informasi dapat tersaji pada berbagai macam media, baik media lama maupun media baru. dalam penelitian ini, persebaran informasi yang akan diteliti menyebar melalui media baru, sehingga pencarian informasi yang akan dilakukan tentu saja dilakukan melalui media baru.

Pengelompokan media baru selanjutnya dilakukan Ward (1995: 279, 2016: 208) melalui media baru yang berhubungan dengan berita dan yang tidak terlihat

sangat bervariasi jauh melebihi kelompok media tradisional. McQuail (2018: 127) membuat pengelompokan media baru menjadi empat kategori.

1. Media komunikasi interpersonal yang terdiri dari telepon, handphone, e-mail.
2. Media bermain interaktif seperti komputer, videogame, permainan dalam internet.
3. Media pencarian informasi yang berupa portal pencarian atau search engine.
4. Media partisipasi kolektif seperti penggunaan internet untuk berbagi dan pertukaran informasi, pendapat, pengalaman dan menjalin melalui komputer dimana penggunaannya tidak semata-mata untuk alat namun juga dapat menimbulkan afeksi dan emosional.

Kemudian Mcquail (2020: 302) menjelaskan pula bahwa munculnya media baru yang membawa ke konsep masyarakat informasi sebagai masyarakat yang *“dependent upon complex electronic information and communication networks and which allocate a major portion of their resources to information and communication activities”*.

Dari sini diketahui bahwa pencarian informasi yang diteliti dalam penelitian ini adalah pencarian informasi dengan media baru, dimana media yang digunakan

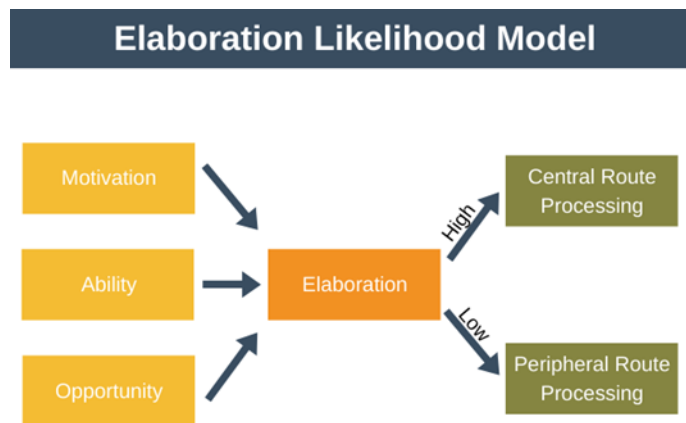
dalam pencarian informasi oleh digital imigran ini adalah media interpersonal, dan media pencarian informasi. Adanya keterlambatan dalam memahami konsep digital dan fitur digital dibarengi dengan kebutuhan komunikasi yang mengikuti teknologi, menjadi tantangan dan hal yang perlu diteliti dari sekelompok digital imigran.

2.4 Pengelolaan Informasi

Setelah pencarian informasi dilakukan, selanjutnya konsumen informasi akan mengolah atau mengelaborasi informasi yang didapatkan. Pengelolaan informasi termasuk dalam proses pemaknaan individu terhadap informasi yang diterima. Terhadap informasi yang telah didapatkan, seseorang akan memaknai sebuah informasi dimana pemaknaan seseorang akan sebuah informasi tentu saja tidak selalu sama antara satu orang dengan orang yang lain. dalam proses pengelolaan informasi inilah sebuah informasi ditransformasikan menjadi sebuah makna yang bisa jadi akan mempengaruhi kepercayaan seseorang akan sebuah informasi.

Terdapat sebuah teori yang dikemukakan oleh Richard Petty dan John Cacioppo mengungkapkan teori Kemungkinan Elaborasi dari informasi yang telah diterima, yaitu *Elaboration Likelihood Model*. Dalam teori ini dinyatakan bahwa dalam pemaknaan sebuah informasi, setiap pribadi memiliki caranya sendiri dalam memproses dan mengelola sebuah informasi.

Gambar 2.1 Elaboration Likelihood Model



Sumber : Lapthrinx melalui Praxis

Penerimaan konsumen informasi terhadap suatu informasi menurut teori ini dibagi menjadi dua bagian dari elaborasi yang terjadi di masyarakat, yaitu rute sentral (*central route*) dan rute peripheral (*peripheral route*). Kedua rute ini mempengaruhi elaborasi atau non-elaborasi yang akan terjadi akibat adanya informasi yang didapatkan oleh masyarakat atau massa. Rute sentral terjadi pada orang-orang yang memiliki motivasi besar dan kritis terhadap sebuah informasi sehingga mengakibatkan sebuah respon yang panjang atau biasa disebut *long endurance respond*, sementara rute peripheral terjadi pada orang-orang yang lebih pasif terhadap informasi, memiliki motivasi yang rendah terhadap sebuah informasi, sehingga respon yang didapatkan adalah respon pendek tanpa berpikir panjang dan mudah digoyahkan oleh faktor-faktor intervensi yang lain atau biasa disebut *short term respond*.

Elaboration Likelihood Model menjelaskan bahwa sikap dapat dibentuk secara lebih permanen atau temporer tergantung pada alur pengolahan pesan. Sikap

permanen dihasilkan dari proses yang melibatkan motivasi, kemampuan dan kesempatan untuk melakukan elaborasi terhadap isi pesan persuasi, sedangkan sikap yang temporer terjadi ketika motivasi, kesempatan dan kemampuan mengelaborasi isi pesan rendah atau tidak ada.

2.5 Digital Imigran

Pada penelitian ini, objek yang akan diteliti adalah orang dewasa dengan kelompok usia 35 tahun keatas. Penelitian ini akan menganalisa pengalaman pencarian dan pengelolaan informasi dari orang dewasa kelompok usia 35 tahun keatas. Orang dewasa kelompok usia 35 tahun kepada dikategorikan sebagai digital imigran, yaitu orang yang bermigrasi dari masa non-digital ke masa digital. Pengkategorian ini telah terlebih dahulu dilakukan oleh Marc Prensky.

Pada tahun 2001, Marc Prensky pada artikelnya yang berjudul *Digital Natives, Digital Immigrants* menyebutkan bahwa masyarakat kelompok usia 35 tahun keatas adalah kelompok digital imigran yang mengalami masa pergantian dari media lama ke arah media baru, sementara generasi yang lahir diatas tahun 1990 disebut digital native karena tumbuh di masa dimana teknologi sudah berkembang. Pada kelompok usia 35 tahun keatas dimana masa mudanya tidak mengenal teknologi, keberadaan teknologi di masa tuanya adalah menjadi hal baru yang menarik dan menyenangkan untuk dijelajahi, yang berakibat timbulnya rasa ingin tahu yang tinggi dan perasaan *excitement* atau kesenangan dalam menjelajahnya. Sayangnya, excitement ini tidak dibarengi dengan kemampuan

berkomunikasi yang seharusnya turut berkembang seiring kemudahan yang disajikan oleh media baru.

Menurut Marc Prensky digital imigran sangat rentan mengalami *culture shock* dalam pengoprasian media baru dan pemaknaan informasi yang tersebar di media baru. Dengan resiko tersebut, keterbatasan kemampuan kelompok usia 35 tahun keatas membuat mereka menjadi rentan untuk merespon informasi dengan cepat tanpa mementingkan kebenaran informasi yang diterima Hal ini berkaitan dengan adanya *culture-shock* yang terjadi kepada kelompok usia tersebut dalam berteknologi sehingga kelompok usia tersebut rawan merespon suatu informasi dengan gegabah atau bahkan mudah terpengaruh oleh suatu informasi.

2.6 Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)

Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) adalah sebuah lembaga pendidikan tinggi milik pemerintah yang bergerak di bidang kepomongprajaan yang bertujuan menghasilkan kader pemerintahan yang berkompetensi, berkarakter, dan berkepribadian.

Institut Pemerintahan Dalam Negeri menyelenggarakan program pendidikan meliputi program Diploma IV, Sarjana, Pascasarjana dan Program Profesi Kepomongprajaan. Menurut website resmi milik Institut Pemerintahan Dalam Negeri ini pada awalnya bernama APDN yaitu Akademi Pemerintahan Dalam Negeri dengan perkembangan penyelenggaraan pemerintahan yang semakin kompleks, luas dan dinamis, maka pendidikan aparatur di lingkungan

Departemen Dalam Negeri dengan tingkatan kursus dinilai sudah tidak memadai. Berangkat dari kenyataan tersebut, mendorong pemerintah mendirikan Akademi Pemerintahan Dalam Negeri (APDN) pada tanggal 17 Maret 1956 di Malang, Jawa Timur. APDN di Malang bersifat APDN Nasional berdasarkan SK Mendagri No. Pend.1/20/56 tanggal 24 September 1956. Melihat adanya beberapa kekurangan maka sempurnakanlah lembaga pendidikan ini maka dibentuklah Institut Ilmu Pemerintahan (IIP) yang berkedudukan di Kota Malang Jawa Timur berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 8 Tahun 1967, selanjutnya dikukuhkan dengan Keputusan Presiden Nomor 119 Tahun 1967. Pada tahun 1972 Institut Ilmu Pemerintahan (IIP) yang berkedudukan di Malang Jawa Timur dipindahkan ke Jakarta melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1972. Mengingat perkembangan kebutuhan akan lulusan Pamong Praja, APDN Nasional ditingkatkan statusnya menjadi Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN) berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 1992 tentang Peningkatan APDN Nasional menjadi Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri. Berdasarkan keputusan Presiden ini, status APDN Nasional menjadi STPDN dengan Program Studi Diploma Tiga (DIII) Pemerintahan dan diresmikan oleh Presiden RI pada tanggal 18 Agustus 1992.

Perubahan dan peningkatan kualitas pendidikan bagi calon aparatur pemerintahan negara ini terus berlanjut sehingga mendorong Departemen Dalam Negeri untuk mengintegrasikan STPDN dan IIP ke dalam satu wadah pendidikan

tinggi. Usaha pengintegrasian STPDN dan IIP secara intensif dan terprogram sejak tahun 2003 sejalan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pengintegrasian ini terwujud dengan ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2004 tentang Penggabungan STPDN ke dalam IIP dan sekaligus merubah nama IIP menjadi Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). Tujuan penggabungan STPDN ke dalam IIP tersebut, selain untuk memenuhi kebijakan pendidikan nasional juga untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pendidikan kader pamong praja di lingkungan Departemen Dalam Negeri. Perpres 1 Tahun 2009 ditindaklanjuti dengan Permendagri No. 36 Tahun 2009 tentang Statuta IPDN dan Permendagri No. 39 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja IPDN, yang menetapkan bahwa IPDN merupakan salah satu komponen di lingkungan Kementerian Dalam Negeri yang melaksanakan tugas menyelenggarakan pendidikan tinggi kepamongprajaan.

Menurut Peraturan Rektor IPDN nomor 5 tahun 2020 menerangkan bahwa visi IPDN adalah Menjadi Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan yang Unggul, Profesional, Berintegritas, dan Berdaya Saing Pada Tahun 2045. Dalam usaha untuk mewujudkan visi ini, IPDN memiliki misi sebagai berikut

1. Menyelenggarakan pendidikan kepamongprajaan dengan mengembangkan, membina, dan memperkuat disiplin ilmu pemerintahan yang bersifat teoritis dan empiris;

2. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk menerapkan dan mengembangkan teori serta praktek pemerintahan yang inovatif, berwawasan nasional dan berakar pada kearifan lokal;
3. Mengembangkan pendidikan kepamongprajaan yang selaras melalui pendidikan akademik, vokasi dan profesi sesuai kebutuhan bangsa, pemerintah, daerah serta kemajuan masyarakat;
4. Menyebarluaskan pengalaman dan temuan-temuan inovatif dalam disiplin ilmu pemerintahan, teoritis dan ilmu pemerintahan terapan untuk kepentingan bangsa, pemerintah dan daerah serta kemajuan masyarakat.

2.7 Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP)

Menurut website resmi PIP Semarang, Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang berdiri pada tahun 1951 dengan nama Sekolah Pelayaran Semarang atau yang disingkat SPS. Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang adalah pendidikan tinggi negeri milik Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dan telah masuk White List di International Maritime Organization tahun 2000. Mengemban tugas mendidik dan melatih pemuda-pemudi lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) di bidang pelayaran dan pelabuhan menjadi Perwira Pelayaran Besar dan Tenaga Ahli Angkutan Laut/Kepelabuhanan guna memenuhi kebutuhan armada angkutan laut nasional maupun internasional.

Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang berdiri pada tahun 1951 dengan nama Sekolah Pelayaran Semarang atau yang disingkat SPS. Pada Tahun 1979 hingga tahun 1995 menjadi Balai Pendidikan dan Latihan Pelayaran (BPLP) Semarang

dengan program Strata A (Diploma III) dengan lama pendidikan 3 tahun. Pada Tahun 1955 hingga tahun 1975 menjadi Sekolah Pelayaran Menengah Semarang disingkat SPM Semarang. Pada Tahun 1995 masih tetap bernama BPLP Semarang, tetapi program pendidikannya ditingkatkan menjadi Diploma IV (setara Sarjana/S1) dengan Politeknik Ilmu Pelayaran pendidikan 4 tahun. Pada Tahun 1974 hingga tahun 1981 menjadi Pendidikan Perwira Pelayaran Besar disingkat P3B Semarang. Pada Tahun 1999 berdiri Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 81 Tahun 1999 tanggal 13 Oktober 1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Ilmu Pelayaran.

PIP Semarang memiliki Visi untuk Menjadi Perguruan Tinggi Pelayaran Niaga yang Profesional, Mandiri dan Berwawasan Global. Visi ini diikuti dengan Misi yaitu :

1. Memberikan pelayanan pendidikan dan pelatihan berstandar nasional dan internasional untuk menghasilkan sumber daya pelayaran yang prima, profesional, beretika.
2. Mengembangkan penguasaan ilmu terapan dan teknologi bidang pelayaran melalui penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Melaksanakan tata kelola kelembagaan yang transparan dan akuntabel dan mandiri dengan meningkatkan kemampuan seluruh sumber daya organisasi secara terus menerus.

4. Menjalin kerjasama dengan stakeholder, dunia usaha, dunia industri dan alumni demi terwujudnya jejaring kinerja berkelanjutan.